

Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula,
Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong
dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan
Tipikor, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (Antara)

DAPAT **ABOLISI** DARI PRESIDEN, TOM LEMBONG **BERSIH?**

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong bakal mendapat pengampunan setelah abolisi yang diajukan Presiden Prabowo Subianto mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (31/7/2025) yang menjelaskan bila seluruh fraksi di DPR telah menyepakati usulan tersebut. Saat ini tinggal menunggu penerbitan Keputusan Presiden (Keppres). Abolisi merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah yang dilakukan Presiden kepada individu atau beberapa orang. Walhasil, Tom Lembong bisa dikatakan akan bersih dari masalah hukum yang menyeretnya. Diketahui, dia terserer ke meja hijau dan dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun dalam kasus korupsi impor gula. Dalam putusannya hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengatakan Tom Lembong terbukti melakukan perbuatan korupsi terkait impor gula kristal mentah. Meski demikian, hakim juga mengatakan Tom tidak menerima uang hasil korupsi tersebut.





AIRLANGGA BERHARAP VISA CASCADE RI-UE DORONG PERTUMBUHAN BISNIS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi dalam peluncuran EU visa cascade di Jakarta, Kamis (31/7/2025) (Antara)

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Eropa (UE) mengumumkan kebijakan Visa Cascade bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kamis (31/7/2025). Dengan adanya kebijakan ini, WNI yang sudah pernah mengunjungi wilayah Uni Eropa dua kali atau lebih, bisa mengajukan visa Schengen jenis multi-entry, sehingga mereka bisa bolak-balik ke Uni Eropa dan mendorong pertumbuhan bisnis Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen di Brussel pada 13 Juli 2025 lalu.

"Warga Negara Indonesia yang memiliki setidaknya satu visa Schengen dalam tiga tahun terakhir kini berhak mendapatkan visa masuk ganda dengan masa berlaku hingga lima tahun. Indonesia sudah menyediakan visa on arrival untuk 27 negara Uni Eropa," ujar Airlangga dikutip tempo, pada Kamis (31/7/2025).

Menurut Airlangga, fasilitas visa cascade tidak hanya mempermudah wisatawan asal Indonesia, tetapi juga memfasilitasi mobilitas para pelaku usaha yang ingin

mengunjungi kawasan Schengen di Eropa untuk keperluan bisnis, seperti menghadiri forum dagang, bertemu investor, hingga mengikuti lokakarya.

"Kunjungan ke Eropa yang berkembang saat ini bukan hanya untuk perjalanan wisata, tetapi juga untuk bisnis, perdagangan, lokakarya, riset pasar, menjalin jejaring, serta berbagai urusan bisnis lainnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers peluncuran EU visa cascade di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Airlangga berharap kebijakan Visa Cascade ini akan berdampak langsung kepada perekonomian dan bisnis Indonesia. Pasalnya, kini para pebisnis RI bisa lebih mudah untuk melakukan perjalanan bisnis ke Eropa.

"Komunitas bisnis kita kini memiliki lebih banyak fleksibilitas, sehingga para pengusaha kini dapat menghadiri pameran dagang, forum bisnis, dan pertemuan investasi di seluruh Uni Eropa dengan lebih mudah," kata

Airlangga.

Airlangga berharap kebijakan Visa Cascade ini bisa meningkatkan kehadiran global Indonesia di pasar Eropa. Selain itu, membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi produk RI di Benua Biru.



"Saya berharap kebijakan Visa Cascade baru ini akan semakin meningkatkan kehadiran global Indonesia serta membuka peluang ekspor yang lebih besar di pasar Eropa, dan menawarkan variasi produk yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen Uni Eropa,"

AIRLANGGA HARTARTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

"Saya berharap kebijakan Visa Cascade baru ini akan semakin meningkatkan kehadiran global Indonesia serta membuka peluang ekspor yang lebih besar di pasar Eropa, dan menawarkan variasi produk yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen Uni Eropa," ujarnya.

Airlangga menyebut selama ini banyak pelaku usaha Indonesia yang rutin menghadiri pameran produk internasional seperti Hannover Messe, SIAL Paris, Ambiente Frankfurt, Paris Fashion Week, hingga Medica Dusseldorf.

Partisipasi tersebut dinilai turut mendorong pertumbuhan ekspor produk Indonesia ke pasar Eropa. "Saya harap kebijakan visa cascade baru ini akan meningkatkan kehadiran Indonesia

secara global dan menciptakan peluang ekspor yang lebih besar di pasar Eropa, dengan varian produk yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif," jelasnya.

Menkopenambakan, kemudahan akses ke Eropa juga akan memperluas peluang kolaborasi di bidang riset dan pengembangan (R&D) serta inovasi. Kebijakan ini juga bisa membuka kesempatan lebih besar bagi generasi muda, pelaku usaha rintisan (startup), hingga investor untuk belajar dan membangun jejaring di Eropa.

"Apalagi IEU CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa) nanti akan efektif (berlaku), mudah-mudahan bisa dipercepat di tahun depan sehingga peluang dengan penurunan tarif ke nol (persen) ini, peluangnya sangat terbuka luas," paparnya dikutip antara.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi turut menyambut lebih banyak pelaku bisnis Indonesia yang berkunjung ke Eropa dengan memanfaatkan sistem visa cascade.

"Sistem ini akan memungkinkan mereka merencanakan kunjungan dengan lebih baik, karena mereka dapat bepergian beberapa kali. Ini jauh lebih praktis, efisien secara biaya," terangnya.

Adapun berdasarkan sistem visa cascade, WNI yang bermukim di Eropa kini dapat diberikan visa Schengen Multiple Entry yang berlaku selama lima tahun setelah memperoleh dan menggunakan satu visa sah dalam tiga tahun sebelumnya, jika paspor tersebut masih memiliki masa berlaku yang cukup.

Selama masa berlaku visa tersebut, pemegangnya bisa memperoleh hak perjalanan yang setara dengan warga negara bebas visa. Sebagai catatan, pada 2024, para WNI yang mengajukan visa Schengen tercatat 203.557 orang.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi mengatakan dengan adanya Visa Cascade ini, WNI yang pernah mendapatkan Visa Schengen, bisa mengajukan visa Cascade dengan tenggat waktu visa selama lima tahun tanpa harus mengajukan visa kembali. Akan tetapi bagi WNI yang baru pertama kali mengunjungi Eropa, maka tetap menggunakan ketentuan yang lama, dan akan mendapatkan visa Cascade pada pengajuan berikutnya.

"Sekarang, setelah satu visa, visa yang digunakan secara sah, Anda pergi ke negara tujuan berikutnya, dan Anda mendapatkan visa masuk berkali-kali selama lima tahun, lima tahun," kata Chaibi. (ant,ist/lut)



Anggota Komisi XI DPR RI, Anna Mu'awanah.

DPR Minta Tinjauan Ulang Pemblokiran Rekening Nganggur

Anggota Komisi XI DPR RI, Anna Mu'awanah, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meninjau ulang kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif yang dinilai telah menimbulkan keresahan dan kerugian di kalangan masyarakat.

Menurut Anna, banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat rekening mereka diblokir tanpa pemberitahuan yang jelas, padahal tidak semua rekening tersebut digunakan untuk aktivitas mencurigakan atau melanggar hukum. "Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang tiba-tiba tidak bisa mengakses rekening miliknya hanya karena dinyatakan 'tidak aktif'. Padahal, tidak semua rekening pasif menunjukkan adanya indikasi pelanggaran. Ada yang memang digunakan untuk menabung dalam jangka panjang, atau digunakan hanya untuk kebutuhan tertentu seperti pembayaran sekolah atau kegiatan musiman," ujar Anna di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Anna menegaskan pentingnya PPATK dan otoritas terkait, termasuk perbankan, agar lebih bijak dalam menetapkan parameter rekening tidak aktif dan memberikan notifikasi lebih awal kepada pemilik rekening sebelum dilakukan tindakan pemblokiran.

Lebih jauh, ia mengusulkan beberapa langkah konstruktif. Pertama, Pemetaan yang Akurat. Anna mendorong PPATK melakukan klasifikasi yang lebih akurat antara rekening tidak aktif karena faktor administratif biasa dan rekening yang memang patut dicurigai secara transaksional.

Kedua, lanjut dia, Pemberitahuan

Bertahap. Sebelum dilakukan pemblokiran, Anna mendorong pihak bank memberikan notifikasi berjenjang kepada nasabah, baik melalui email, SMS, maupun aplikasi perbankan.

Ketiga, Skema Rekonsiliasi. Menurut Anna, Pemerintah perlu mendorong adanya forum antara PPATK, OJK, dan perbankan untuk mengevaluasi kebijakan pemblokiran rekening agar tidak merugikan masyarakat umum yang tidak terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal.

"Dan yang keempat, Literasi Keuangan. Ini saya kira juga penting dilakukan untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat, termasuk sosialisasi mengenai ketentuan rekening dorman (tidak aktif) dan potensi konsekuensinya," ujarnya.

Anna menegaskan bahwa upaya memberantas tindak pidana keuangan harus tetap menjunjung asas keadilan dan tidak menimbulkan kegelisahan publik yang justru melemahkan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

"Kita mendukung langkah-langkah pemberantasan kejahatan keuangan, tapi jangan sampai masyarakat kecil yang justru menjadi korban. Penegakan harus berimbang antara kepentingan hukum dan perlindungan hak publik," pungkasnya.

Sementara itu, PPATK telah membuka 28 juta rekening yang sebelumnya diblokir sementara karena tidak aktif atau rekening dormant. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana memastikan seluruh proses pemblokiran dan pembukaan blokir rekening dilakukan dengan hati-hati.

"Semua aman 100 persen. Ini sedang dilindungi dan dijaga. Kan kami juga sudah buka (blokir) 28 juta rekening sejak Mei kemarin," ujar Ivan dilansir kumparan, Kamis (31/7/2025).

Dia menandas-kan bahwa kebijakan penghentian sementara rekening ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK menyebut, banyak rekening nganggur yang digunakan untuk aktivitas ilegal, mulai dari jual beli ilegal hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ivan mengatakan PPATK mencatat setidaknya ada 10 juta rekening penerima bansos yang tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun. Dana yang mengendap dari rekening-rekening tersebut mencapai Rp2,1 triliun.

Tak hanya itu, lebih dari 140 ribu rekening terpantau tidak aktif selama satu dekade, dengan nilai simpanan mencapai Rp 428,6 miliar. Selain itu, sekitar 1 juta rekening diketahui memiliki kaitan dengan tindak pidana. (rls,ist/lut)

"Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang tiba-tiba tidak bisa mengakses rekening miliknya hanya karena dinyatakan 'tidak aktif'. Padahal, tidak semua rekening pasif menunjukkan adanya indikasi pelanggaran. Ada yang memang digunakan untuk menabung dalam jangka panjang, atau digunakan hanya untuk kebutuhan tertentu seperti pembayaran sekolah atau kegiatan musiman,"

Anna Mu'awanah
Anggota Komisi XI DPR RI

REKAP ISU REKENING DORMANT

DPR Kritik Pemblokiran Rekening Dormant

Anggota Komisi XI DPR, Anna Mu'awanah, meminta PPATK meninjau ulang kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif karena banyak masyarakat merasa dirugikan tanpa notifikasi yang layak.

Alasan & Dampak Pemblokiran

Rekening yang diblokir tidak semuanya terlibat aktivitas ilegal. Banyak digunakan untuk tabungan jangka panjang, pembayaran musiman, atau keperluan administratif biasa.

Empat Usulan DPR

- Pemetaan akurat rekening tidak aktif
- Notifikasi bertahap sebelum pemblokiran
- Forum evaluasi antara PPATK, OJK, dan perbankan
- Peningkatan literasi keuangan masyarakat

PPATK: Pemblokiran Berdasar UU

PPATK membela kebijakan ini sebagai langkah pencegahan TPPU. Mereka telah membuka 28 juta rekening yang sempat diblokir, dengan fokus pada rekening pasif bernilai triliunan rupiah yang terindikasi digunakan untuk kejahatan keuangan.

Nasabah Bisa Ajukan Keberatan

Pemilik rekening yang merasa dirugikan bisa mengisi formulir keberatan di bit.ly/FormHenSem. Proses verifikasi berlangsung 5-20 hari kerja. Status rekening juga bisa dicek lewat ATM, mobile banking, atau ke bank langsung.



HATI-HATI! SEMINGGU SEKALI ADA YANG MAU MENIPU WARGA RI

Menurut Laporan Penipuan Asia Global Anti-Scam Alliance (GASA) 2024, 65 persen orang Indonesia mengalami upaya penipuan setiap minggu. Kerentanan konsumen, dan taktik penipuan yang berkembang harus diikuti kebijakan dan langkah antisipasi.

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) dan Mastercard, bersama dengan AFTECH, mengumumkan peluncuran Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia Chapter.

Sebagai salah satu ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia, Indonesia sangat dinamis namun juga rentan.

Menurut Laporan Penipuan Asia GASA 2024, 65 persen orang Indonesia mengalami upaya penipuan setiap minggu.

Mulai dari pesan phishing dan tawaran pekerjaan palsu hingga penipuan investasi.

Peluncuran GASA Indonesia Chapter merupakan respons strategis untuk menghadapi ancaman yang semakin meningkat ini secara langsung.

GASA Indonesia Chapter akan dipimpin oleh Indosat sebagai Ketua, serta Mastercard dan AFTECH sebagai Wakil Ketua, dengan organisasi terkemuka seperti DANA, Google, GSMA, Meta, Shopee, dan Tech for Good Institute bergabung dalam koalisi ini.

Ini adalah GASA Chapter kedua yang diluncurkan di Asia Tenggara, setelah pembentukan Chapter Singapura tahun lalu.

Penipuan telah menjadi masalah yang meresahkan, memengaruhi konsumen, bisnis, dan institusi, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi lebih mendesak dari sebelumnya.

GASA Indonesia Chapter akan fokus pada berbagi intelijen antar industri, kampanye edukasi publik, dan inovasi kebijakan untuk memperkuat kepercayaan dan keamanan digital.

Misi utama GASA Indonesia

Chapter adalah membangun koalisi sektor swasta yang bekerja sama erat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan institusi terkait lainnya.

Kolaborasi ini memastikan sinergi yang kuat antara sektor publik dan swasta dalam melawan penipuan.

Pembentukan GASA Indonesia Chapter ini didorong oleh komitmen bersama Indosat dan Mastercard untuk menyatukan pemangku kepentingan sektor publik dan swasta dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

Friderica Widayarsi Dewi, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Literasi Keuangan, dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan, "OJK menyambut baik pembentukan GASA

Indonesia Chapter sebagai inisiatif strategis yang selaras dengan misi kami melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dalam memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan untuk menangani scam dan meningkatkan perlindungan konsumen."

Sebelumnya, Indonesia Anti Scam Center (IASC) telah menerima sebanyak 128.281 laporan kasus penipuan sampai 23 Mei 2025. Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 208.333 dan jumlah rekening yang telah diblokir sebanyak 47.891. Dia bilang total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp 2,6 triliun. "Total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp 163 miliar," katanya.

Sedangkan Reski Damayanti, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison dan Ketua GASA

Indonesia, menyatakan, penipuan bukan lagi insiden yang terisolasi, ini telah menjadi ancaman sistemik.

"Kami percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab kolektif untuk bertindak tegas. GASA Indonesia Chapter mewakili front yang bersatu, menyatukan industri, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk melindungi publik dan memulihkan kepercayaan," ucapnya di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Jorij Abraham, Managing Director Global Anti-Scam Alliance, menambahkan, Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi digital Asia Tenggara dan merupakan salah satu pasar paling dinamis di dunia.

Seiring dengan meningkatnya skala dan kecanggihan penipuan, membangun ekosistem terpercaya untuk perlindungan konsumen menjadi semakin penting.

"Bersama-sama, kita akan membangun komunitas online yang lebih kuat dan aman," ujarnya. (wid,rls,ist,ant/dya)



POLRES Jakarta Selatan (Jaksel) mengungkap jaringan penipuan online atau online scam di sebuah rumah di Jalan Pertanian Raya Nomor J3, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Sebanyak 11 WN China ditangkap.

Berdasarkan hasil penyelidikan Polres Jaksel, mereka diduga melakukan praktik penipuan daring dengan menyamar sebagai aparat penegak hukum dari Tiongkok.

Mereka menyewa sebuah rumah, dan membuat interior rumah itu seolah-olah menjadi sebuah kantor Polisi lengkap dengan simbol dan aksara mandarin.

"Di belakang saya ini, setelah kami cek, arti daripada tulisan-

tulisan berbahasa Mandarin itu adalah Kepolisian Cabang Hucang Wuhan, Datasemen Investigasi Ekonomi," jelas Kapolres Jaksel, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, di lokasi kejadian, Rabu (30/7).

Nicolas menuturkan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga sekitar yang curiga dengan aktivitas para penghuni rumah tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap 11 WNA yang diduga berkewarganegaraan China.

"Peristiwa ini terjadi atau pengungkapan ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 sekitar pukul 18.30 WIB," ujarnya.

Lalu, polisi menangkap 11 orang pelaku yang semuanya adalah Warga Negara China. Yakni LYF (35), SK (24), HW (43), CZ (47), YH (32), HY (48), LZ (33), CW (40), ZL (41), JW (36), dan SL (37).

Lebih lanjut, Kapolres menyebut para pelaku tidak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris. Hal ini membuat polisi menduga kuat korban penipuan mereka berada di negara asal mereka.

"Kalau ada korban di Indonesia tolong disampaikan kepada kami supaya kami bisa melakukan tindakan selanjutnya terhadap kesebelas orang yang diamankan ini," ucap dia.

Atas perbuatannya, mereka dijerat Pasal 28 UU No.1 Tahun 2024 (perubahan atas UU ITE), Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal-pasal dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima penyerahan 11 WNA tersebut. Menurutnya, saat ini para pelaku sedang dalam pemeriksaan mendalam oleh bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Ia menilai para pelaku diduga sudah didoktrin untuk tetap bungkam apabila tertangkap. (wid,rks,ist/dya)



Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (kedua kiri) tiba untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Juni lalu.dok.ist

Penyelidikan Korupsi Google Cloud **KPK BUKA PELUANG PANGGIL NADIEM**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim untuk meminta keterangan terkait penyelidikan Google Cloud. Termasuk rmpat stafsus lainnya yang belum diperiksa yaitu Jurist Tan, Pramoda Dei Sudarmo, Muhamad Heikal, dan Hamid Muhammad.

detail terkait dengan materi-materi dalam pemeriksaan atau permintaan keterangan kepada yang bersangkutan," ucap Budi.

Waktu atau tempus dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK ini terjadi pada saat pandemi Covid-19.

Sebelumnya, KPK memang sudah memastikan bahwa dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud terjadi pada era Menteri Nadiem Makarim. Bahkan, lembaga antirasuah tersebut mengatakan, proyek tersebut terjadi bersamaan dengan proyek pengadaan laptop Chromebook pada 2020-2022 - proyek senilai Rp9,9 triliun yang kemudian diusut Kejaksaan Agung.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyelidikan Google Cloud di Kemendikbudristek berbeda dengan kasus dugaan korupsi laptop pendidikan Chromebook yang sedang

ditangani Kejaksaan Agung.

"Terkait dengan Google Cloud, apakah sama dengan Chromebook yang sekarang sedang ditangani [Kejagung], berbeda jawabannya," ujar Asep, Jakarta, Jumat (25/7) seperti dikutip dari Antara.

Asep menjelaskan kasus Chromebook terkait dengan pengadaan perangkat keras, sedangkan Google Cloud merupakan pengadaan perangkat lunak. Walaupun demikian, Asep mengatakan KPK tetap akan berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung terkait penyelidikan Google Cloud.

"Kami tentunya juga sudah berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk penanganan perkaranya karena nanti ini menjadi hal yang berbeda, walaupun ini paket yang tidak bisa dipisah antara hardware [perangkat keras] dengan software [perangkat lunak]," kata jenderal polisi bintang satu ini.

Pengadaan Google Cloud juga berkaitan dengan pengadaan internet gratis di lingkup kementerian. Dalam kasus ini, kata dia, para penyelidik tengah memeriksa adanya dugaan praktik kemahalan atau penetapan

harga yang terlalu tinggi.

Sebulan yang lalu, Fiona baru saja diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam perkara pengadaan laptop Chromebook di Kementerian tersebut pada 2019-2022. Dia diperiksa karena sempat tercatat mengikuti sejumlah pertemuan dan rapat yang menentukan pengadaan laptop dengan ChromeOs tersebut.

Sejumlah peserta rapat lainnya kemudian menjadi tersangka mereka adalah rekan Fiona yang juga menjabat sebagai staf khusus Nadiem, Jurist Tan; konsultan Jurist Tan, Ibrahim Arief; serta dua pejabat kementerian. Mereka adalah Direktur SMP Kemendikbudristek Mulatsyah; dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih.(wid,rls,ist/dya)

Kemungkinan tersebut disampaikan setelah penyelidik merampungkan klarifikasi terhadap mantan Staf Nadiem yang bernama Fiona Handayani, Rabu (30/7/2025).

"Semua terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak, siapa saja yang memang diduga mengetahui konstruksi perkara tersebut," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip Kamis (31/7/2025).

Selain Nadiem, KPK juga membuka peluang untuk mengklarifikasi mantan staf khusus Nadiem lainnya. Di antaranya seperti Jurist Tan, Ibrahim Arief hingga Norbertus Arya Dwiangga.

"Semua kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi sebuah perkara tentu akan dilakukan oleh KPK," tutur Budi.

"Tentu keterangan-keterangan itu akan membantu KPK untuk membuat terang suatu perkara yang sedang ditangani," tandasnya.

Sementara itu, mengenai hasil klarifikasi terhadap Fiona, Budi tidak bisa berbicara banyak. Hal itu dikarenakan proses penyelidikan masih bersifat rahasia atau tertutup.

"Yang bersangkutan dimintai keterangan terkait dengan pengadaan Google Cloud yang saat ini sedang di tahap penyelidikan sehingga kami belum bisa menyampaikan secara

Selangkah Lagi Jurist Tan Jadi Buron

DI SISI LAIN, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah tiga kali melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Jurist Tan (JT) selaku staf khusus atau stafsus mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, yang menjadi tersangka di kasus korupsi laptop Chromebook. Namun begitu, Jurist Tan tidak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, pihaknya tengah mempersiapkan langkah Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dilanjutkan Red Notice.

"On process, Kan sudah panggilan ketiga. Berarti kan tinggal, mungkin dalam waktu dekat nanti kami kabari pastinya. Yang jelas, on process," tutur Anang di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

Sementara soal lokasi Jurist Tan, kembali Kejagung belum dapat

membeberkan lebih jauh. Sementara desas-desus semakin meluas, dari yang tadinya diduga berada di Australia, kini muncul Singapura hingga Afrika.

"Penyidik sudah mendapatkan informasi beberapa, termasuk dari salah satunya ya Pak Boyamin MAKI. Semua informasi dari mana pun kita pelajari, didalami oleh penyidik dalam rangka nanti menghadirkan yang bersangkutan," kata Anang.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi memonitor pergerakan Jurist Tan. Dia terdeteksi meninggalkan Indonesia pada 13 Mei 2025 lalu.

"Yang bersangkutan melewati pemeriksaan imigrasi pada tanggal 13 Mei 2025 Pukul 15:05:08 melalui Bandara Soekarno Hatta," tutur Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman saat dikonfirmasi, Rabu (23/7/2025).

Menurut Yuldi, berdasarkan data perlintasan per tanggal 17 Juli 2025

Daftar Staf Khusus Nadiem Makarim:

-  Bidang Kompetensi dan Manajemen: **Pramoda Dei Sudarmo**
-  Bidang Komunikasi dan Media: **Muhamad Heikal**
-  Bidang Isu-Isu Strategis: **Fiona Handayani**
-  Bidang Pembelajaran: **Hamid Muhammad**
-  Bidang Pemerintahan: **Jurist Tan**

pukul 17.30, tersangka Jurist Tan tidak berada di Indonesia.

"Dari Pengecekan pada Sistem SIPP, yang bersangkutan terbang keluar dari Indonesia menuju Singapura dengan menggunakan pesawat, dengan pesawat Singapore Airlines SQ0961," kata dia.

Sementara itu, Kejagung sempat menggeledah dua tempat terkait kasus pengadaan laptop Chromebook Kemendikbud Ristek, yaitu Apartemen Kuningan Place dan Apartemen Ciputra World 2 usai status perkara dinaikkan ke tingkat penyidikan pada 21 Mei 2025.

Penyidik menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik di kediaman dua Stafsus Nadiem Makarim, atas nama Fiona Handayani dan Jurist Tan.(wid,rls,ist/dya)

Serapan Belanja Kota Batu Seret, Baru 36 Persen



(Ilustrasi) Salah satu pembangunan fisik di wilayah Kecamatan Junrejo, Kota Batu. (dok. Dinas PUPR Kota Batu)

BATU - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu hingga pertengahan tahun 2025 tercatat mencapai 48,23 persen dari target yang ditetapkan. Namun, serapan belanja daerah pada 2025 justru seret, masih di angka 36,35 persen.

Wali Kota Batu, Nurochman, meminta seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan akselerasi percepatan belanja. Guna mendukung percepatan pembangunan di berbagai

sektor.

"Kami meminta perangkat daerah untuk tidak menunda pekerjaan. Akselerasi belanja harus dilakukan, tapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebutuhan yang nyata di lapangan," ujar Nurochman, dikutip pada Kamis (31/7/2025).

Pria yang akrab dengan sapaan Cak Nur, ini menyebutkan, kondisi fiskal Kota Batu per 18 Juni 2025 menunjukkan adanya ketimpangan

antara penerimaan dan belanja daerah. Oleh karena itu, ia meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera mengambil langkah konkret agar serapan anggaran dapat meningkat.

Disampaikannya, pembinaan dan teguran telah diberikan kepada sejumlah SKPD dengan realisasi belanja yang rendah. Menurutnya, banyak pekerjaan yang bisa segera dijalankan agar anggaran terserap secara optimal dalam waktu yang tersisa di tahun anggaran berjalan.

"Kalau proyek fisik seperti pedestrian di Jalan Abdul Gani bisa direalisasikan pada Juli-Agustus, maka serapannya ya akan signifikan," katanya.

Sementara itu, hingga 25 Juli 2025, capaian PAD Kota Batu tercatat sebesar Rp 161,5 miliar dari total target Rp 332,5 miliar. Cak Nur menilai, pencapaian tersebut sudah berada di jalur yang tepat karena hampir menyentuh 50 persen dari target tahun 2025.

"Pemkot Batu melalui OPD penghasil terus berupaya untuk memenuhi target PAD. Hasil pada semester pertama ini saya kira, ya cukup baik karena sudah mencapai hampir setengah dari target," katanya.

Cak Nur menambahkan, upaya untuk memaksimalkan penerimaan PAD akan terus dilakukan melalui sejumlah langkah. Di antaranya adalah pembinaan perpajakan kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan tempat hiburan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta strategi jemput bola ke desa dan kelurahan.

Selain itu, pihaknya juga berencana menggali potensi pajak baru, termasuk dari sektor vila dan rencana pemasangan gate parkir di kawasan Alun-Alun Kota Batu.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, rincian penerimaan PAD semester pertama 2025, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa perhotelan tercatat sebesar Rp14,3 miliar atau 31,6 persen dari target Rp45,5 miliar. Kemudian PBJT makanan dan minuman sebesar Rp12,7 miliar atau 35,35 persen dari target Rp35,9 miliar.

Selanjutnya, PBJT jasa kesenian dan hiburan mencapai Rp16,2 miliar atau 34,19 persen dari target Rp47,4 miliar. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari target Rp34,9 miliar baru terealisasi Rp5,1 miliar atau 14,79 persen. (Santi/Dya)

Dorong Industri Hasil Tembakau Tembus Pasar Ekspor, Pemkot Malang Gelar Bimtek

MALANG - Dalam rangka mendorong kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) terhadap ekspor, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang menggelar Bimbingan Teknis Ekspor Produk. Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini digelar selama dua hari, mulai 31 Juli 2025 hingga 1 Agustus 2025 dan diikuti perwakilan dari pabrik rokok di Kota Malang.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebutkan bahwa Kota Malang memiliki potensi untuk ekspor dari sektor IHT. Saat ini tercatat 56 IHT yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Menurutnya, dengan semakin banyaknya IHT, maka para pelaku sektor ini juga harus dapat membaca peluang dan memperluas pasar, termasuk ke luar negeri.

Eko menambahkan, saat pelaksanaan business matching, minat pasar luar negeri terhadap produk tembakau cukup tinggi. "Permintaan dari pasar luar negeri, khususnya

kawasan Timur Tengah dan Asia, cukup besar. Karena itu, kami mendorong agar produk ini bisa diekspor. Kami juga telah menyampaikan kepada pelaku industri di kota ini mengenai mekanisme ekspor. Jika pasar sudah cocok, permintaan tentu akan terus meningkat," ujar Eko saat membuka kegiatan di Hotel Montana Dua Malang, Kamis (31/7/2025).

Penyelenggaraan bimtek ini menjadi sebuah dukungan pemerintah dalam pengembangan industri dengan memberikan fasilitasi, pendampingan teknis, dan pemahaman menyeluruh, baik terkait prosedur, persyaratan, dan strategi ekspor ke pasar internasional. Melalui kegiatan ini, pelaku IHT diharapkan dapat memahami ketentuan peraturan ekspor, termasuk dokumen, perizinan, serta ketentuan bea cukai dan karantina.

"Mereka juga mendapat pendampingan teknis, mulai dari persiapan produk, pengurusan dokumen, pemilihan jalur distribusi,



Bimtek Ekspor Produk dalam rangka mendorong kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) di Kota Malang, Kamis (31/7/2025). (dok. Diskominfo Kota Malang)

hingga pemanfaatan fasilitas ekspor dari pemerintah. Upaya ini sekaligus mendorong pelaku industri untuk siap menembus pasar global dengan menyesuaikan standar mutu internasional, kemasan layak ekspor, dan strategi pemasaran yang efektif," bebernya.

Bimtek kali ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Pitoyo Pribadi (Kepala Seksi Penyuluhan dan

Layanan Informasi Bea Cukai Malang) dan Lucky Kristian (Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jawa Timur). Kegiatan ini pun menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat jejaring ekspor dan dukungan instansi terkait dalam membangun ekosistem ekspor hasil tembakau yang berkelanjutan di Kota Malang. (Santi/Dya)

Pertama Kali Negara-negara Muslim Kecam Hamas, Ada Apa?

Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, kompak mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, serta menuntut pelucutan senjata dan penghentian kekuasaan Hamas di Gaza.



Militer Hamas Palestina berkumpul di lokasi penyerahan jenazah empat sandera Israel di Khan Younis di Gaza selatan pada 20 Februari 2025. (Foto: AFP)

Dikutip dari The Independent, Kamis (31/7/2025), Deklarasi yang dirilis pada Selasa (29/7/2025) waktu AS di Markas Besar PBB, New York, merupakan tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya, kelompok Hamas secara resmi dikecam oleh negara-negara Arab.

Prancis, yang bersama Arab Saudi, menjadi ketua konferensi internasional itu, menyebut deklarasi tersebut "bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya." Prancis pun menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang menguraikan langkah-langkah konkret menuju implementasi solusi dua negara itu.

"Untuk pertama kalinya, negara-

negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengucilannya dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

Namun, meskipun deklarasi tersebut mencakup janji umum untuk "integrasi regional penuh" dan "langkah-langkah konkret dalam mempromosikan pengakuan bersama, koeksistensi damai, dan kerja sama di

antara semua negara di kawasan," deklarasi tersebut tidak memuat niat eksplisit dari para penandatangan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

Deklarasi yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi ini ditandatangani oleh Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Inggris, Kanada, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil, Meksiko, Norwegia, dan Senegal.

Langkah pertama yang diuraikan dalam deklarasi tersebut adalah mengakhiri perang 22 bulan antara Israel dan Hamas.

"Dalam konteks mengakhiri

perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka," demikian bunyi deklarasi tersebut.

"Setelah gencatan senjata, sebuah komite administratif transisi harus segera dibentuk untuk beroperasi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina," bunyi deklarasi tersebut.

"Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober," tambah deklarasi tersebut. "Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengempungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan," imbuh deklarasi tersebut.

Deklarasi tersebut mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara, yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan menyambut baik "kesiapan yang diungkapkan oleh beberapa negara anggota untuk menyumbangkan pasukan." (The Independent, Cnn, The Times of Israel, ist/nei)

Israel Meradang kala Kanada Siap Akui Palestina

Pemerintah Israel melayangkan protes keras atas pernyataan Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mengumumkan rencana pengakuan negara Palestina pada September mendatang.

Perubahan dalam posisi pemerintah Kanada saat ini adalah hadiah bagi Hamas dan membahayakan upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kerangka kerja untuk pelepasan sandera," tulis Kementerian Luar Negeri Israel dalam unggahan di media sosial X, dikutip dari The Times of Israel, Kamis (31/7/2025).

Iddo Moed, Duta Besar Israel untuk

Kanada, mengatakan bahwa Israel "tidak akan tunduk pada kampanye tekanan internasional yang menyimpang terhadapnya."

"Kami tidak akan mengorbankan keberadaan kami dengan mengizinkan pengakuan negara jihadis di tanah leluhur kami yang mengupayakan penghancuran kami," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Mengakui negara Palestina di tengah tidak adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, lembaga yang berfungsi, atau kepemimpinan yang baik, berarti memberi penghargaan dan melegitimasi kebiadaban Hamas yang mengerikan," lanjut Moed. "Ini menghukum warga Israel dan Palestina yang menjadi korban Hamas, dan membenarkan Hamas," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas

menyambut pengumuman Carney tersebut. Dalam panggilan telepon dengan Carney, menurut kantor berita resmi Palestina, WAFA, yang mengutip Abbas, pemimpin Palestina tersebut mengatakan langkah itu akan "meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di wilayah tersebut."

Pengumuman Carney ini disampaikan setelah deklarasi serupa oleh sesama negara G7, Prancis dan Inggris, seiring meningkatnya kemarahan di antara sekutu-sekutu Israel atas situasi kemanusiaan di Gaza.

Carney mengatakan langkah



Perdana Menteri Kanada Mark Carney berbicara dalam konferensi pers tentang pengakuan negara Palestina sementara Menteri Luar Negeri Anita Anand mendengarkan, di Ottawa, Ontario, Kanada, Rabu (30/7/2025). (Foto: Reuters)

tersebut diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, tujuan lama Kanada yang "terkikis di depan mata kita." (The Times of Israel, Reuters, AFP, ist/nei)

Penyakit 'Silent Killer' yang Perlu Diwaspadai

Kesadaran akan kondisi kesehatan tubuh umumnya dimulai ketika gejala penyakit muncul. Gejala ini krusial untuk membantu diagnosis, mengidentifikasi penyebab, merancang metode pemulihan,

hingga menentukan medikasi yang tepat. Namun, tidak semua penyakit menunjukkan gejala yang nyata, bahkan beberapa berkembang secara senyap tanpa tanda-tanda yang signifikan. Kondisi inilah yang dikenal sebagai "silent killer", penyakit yang dapat merusak tubuh secara progresif tanpa disadari, dan berpotensi fatal jika tidak ditangani secara dini.

Merujuk informasi dari laman Medical News, berikut adalah empat jenis penyakit "silent killer" yang perlu diketahui untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat:

Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)

Hipertensi merupakan masalah kesehatan umum yang sangat berbahaya karena sering kali tidak menunjukkan gejala. Kondisi ini terjadi ketika tekanan dalam pembuluh darah lebih tinggi dari normal, menyebabkan beban ekstra pada jantung dan arteri.

Jika dibiarkan, hipertensi dapat memicu penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, masalah mata, hingga disfungsi ereksi. Fluktuasi tekanan darah sepanjang hari adalah normal, namun faktor-faktor seperti obesitas, usia lanjut, gaya hidup pasif, stres, pola makan tinggi garam, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tetap tinggi.

Karena sering tanpa tanda, hipertensi dijuluki sebagai "pembunuh diam-diam". Sebagian individu baru menyadari kondisinya setelah mengalami pusing, sakit kepala, nyeri dada, atau bahkan serangan stroke. Pengendalian hipertensi melibatkan gaya hidup sehat: olahraga rutin, konsumsi buah dan sayuran, berhenti merokok, membatasi alkohol, dan menjaga berat badan ideal.

Penyakit Kencing Manis (Diabetes)

Diabetes merupakan salah satu masalah kesehatan global terbesar, terutama mengingat tingginya konsumsi gula harian. Diabetes adalah kondisi serius yang memengaruhi seluruh tubuh akibat tingginya kadar

glukosa dalam darah. Normalnya, insulin — hormon dari pankreas — membantu mengubah gula menjadi energi yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Namun, pada penderita diabetes, produksi atau penggunaan insulin terganggu, menyebabkan penumpukan gula dalam darah. Tiga jenis utama diabetes meliputi: tipe 1 (onset mendadak), tipe 2 (sering tanpa gejala yang jelas), dan diabetes gestasional (terjadi pada ibu hamil).

Gejala diabetes meliputi rasa haus berlebihan, mudah lelah, penglihatan kabur, kulit gatal, peningkatan berat badan, atau perubahan suasana hati yang drastis. Jika tidak ditangani, diabetes dapat menyebabkan kerusakan ginjal, mata, saraf, jantung, serta masalah sirkulasi dan seksual. Meskipun belum ada obatnya, diabetes dapat dikelola melalui diet sehat, olahraga teratur, pemantauan gula darah, injeksi insulin (jika diperlukan), menjaga berat badan, dan pemeriksaan rutin ke dokter untuk mencegah komplikasi.

Penyakit Hati Berlemak (Steatosis Hati)

Setiap individu memiliki sejumlah lemak di hati. Namun, jika jumlahnya melebihi 10% dari berat hati, kondisi ini disebut sebagai penyakit hati berlemak atau steatosis. Awalnya mungkin tidak berbahaya, tetapi dapat memicu peradangan, pengerasan, hingga sirosis yang merusak hati. Ada dua jenis utama penyakit ini: akibat alkohol (ALD) dan non-alkohol (NAFLD). NAFLD lebih sering terjadi pada individu dengan obesitas, diabetes, kolesterol tinggi, atau gaya hidup tidak sehat.

Penyakit ini sering kali asimtomatik atau hanya menimbulkan gejala ringan seperti kelelahan, mual, nyeri perut, atau bercak gelap pada kulit. Diagnosis umumnya dilakukan melalui tes darah, USG, atau MRI. Penanganannya meliputi penurunan berat badan, pengurangan asupan lemak dan gula, penghentian konsumsi alkohol, serta pemeriksaan hati secara rutin.

Penyakit Arteri Koroner (PAK)

Penyakit arteri koroner (PAK) terjadi ketika pembuluh darah jantung menyempit akibat penumpukan plak lemak (aterosklerosis). Kondisi

ini memperlambat aliran darah ke jantung dan dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, atau nyeri dada (angina). Faktor risiko yang dapat dikendalikan meliputi merokok, kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, dan kurangnya aktivitas fisik. Sementara itu, faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan meliputi usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga.

Karena sering tanpa gejala, PAK juga dikenal sebagai "pembunuh diam-diam". Gejala biasanya baru terasa saat muncul nyeri dada, sesak napas, atau serangan jantung. Pencegahan dan pengobatan meliputi pola makan sehat, olahraga teratur, penghentian merokok, penggunaan obat-obatan, hingga operasi bypass jika diperlukan. Konsultasi medis disarankan bagi individu yang merasa berisiko.

Kanker

Kanker merupakan penyakit mematikan yang telah lama diakui sebagai "silent killer". Penyakit ini bermula ketika satu atau beberapa gen mengalami mutasi, memicu pembentukan sel-sel kanker. Sel-sel kanker ini kemudian membentuk klaster atau tumor yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui pembuluh darah.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jenis kanker yang paling umum diderita meliputi kanker payudara, kanker paru-paru, kanker kolon, kanker rektum, dan kanker prostat. Pada tahun-

tahun awal seseorang menderita kanker, umumnya tidak ada gejala yang terlihat. Namun, ketika gejala sudah muncul, kondisi kanker cenderung memburuk dengan cepat.

Osteoporosis

Osteoporosis sering dijuluki sebagai "silent killer" karena tidak adanya gejala yang ditimbulkan saat kepadatan tulang menurun. Penderita osteoporosis umumnya baru menyadari kondisi mereka setelah mengalami fraktur atau patah tulang. Patah tulang akibat osteoporosis biasanya terjadi di panggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang.

Risiko seseorang mengidap osteoporosis umumnya berkaitan dengan gender dan usia. Seiring bertambahnya usia, risiko seseorang mengidap osteoporosis akan semakin besar. Amerika Serikat memperkirakan akan terjadi 1,5 juta fraktur osteoporosis setiap tahunnya. (nei,ist/dya)





Studi Baru: Alam Semesta Diprediksi Berakhir Lebih Cepat

Polres Jakarta Selatan (Jaksel) mengungkap jaringan penipuan online atau online scam di sebuah rumah di Jalan Pertanian Raya Nomor J3, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Sebanyak 11 WN China ditangkap.

Berdasarkan hasil penyelidikan para pelaku tidak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris. Hal ini membuat polisi menduga kuat korban penipuan mereka berada di negara asal mereka.

Mereka menyewa sebuah rumah, dan membuat interior rumah itu seolah-olah menjadi sebuah kantor Polisi lengkap dengan simbol dan aksara mandarin.

“Di belakang saya ini, setelah kami cek, arti daripada tulisan-tulisan berbahasa Mandarin itu adalah Kepolisian Cabang Hucang Wuhan, Datasemen Investigasi Ekonomi,” jelas Kapolres Jaksel, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, di lokasi kejadian, Rabu (30/7).

Nicolas menuturkan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga sekitar yang curiga dengan aktivitas para penghuni rumah tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap 11 WNA yang diduga berkewarganegaraan China.

“Peristiwa ini terjadi atau pengungkapan ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 sekitar pukul 18.30 WIB,” ujarnya.

Lalu, polisi menangkap 11 orang pelaku yang semuanya adalah Warga Negara China. Yakni LYF (35), SK (24), HW (43), CZ (47), YH (32), HY (48), LZ (33), CW (40), ZL (41), JW (36), dan SL (37).



Lebih lanjut, Kapolres menyebut para pelaku tidak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris. Hal ini membuat polisi menduga kuat korban penipuan mereka berada di negara asal mereka.

“Kalau ada korban di Indonesia tolong disampaikan kepada kami supaya kami bisa melakukan tindakan selanjutnya terhadap kesebelas orang yang diamankan ini,” ucap dia.

Atas perbuatannya, mereka dijerat Pasal 28 UU No.1 Tahun 2024 (perubahan atas UU ITE), Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal-pasal dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima penyerahan 11 WNA tersebut.

Menurutnya, saat ini para pelaku sedang dalam pemeriksaan mendalam oleh bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Ia menilai para pelaku

diduga sudah didoktrin untuk tetap bungkam apabila tertangkap.

“Kelihatannya memang orang-orang ini sudah didoktrin untuk apabila telah ditangkap kemudian mereka akan berusaha untuk tutup mulut ataupun memberikan keterangan yang makin menjauhkan dari tindak pidana yang dilakukan,” tandasnya.

Rumah yang menjadi markas penipuan daring (online scam) oleh 11 WNA asal China di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ternyata tidak pernah dilaporkan keberadaannya ke pihak lingkungan.

Ketua RT setempat, Sapto, menyebut para penghuni tinggal secara diam-diam tanpa izin atau komunikasi dengan warga.

“Ya memang kita tuh agak curiga dengan rumah ini karena sudah lama tidak membayar iuran, jadi kami selalu mendatangi rumah ini dalam keadaan kosong. Nah

kami berusaha mencoba menghubungi kepada pemiliknya namun belum berhasil, dan kami menanyakan kepada para penyewa sebelumnya juga tidak kooperatif, jadi saya agak kesulitan ya. Kemungkinan sih yang diduga adalah sekitar 4 bulanan gitu,” ujar Sapto, Ketua RT 10 RW 4.

Menurut Sapto, rumah tersebut awalnya milik seorang warga, namun tidak pernah ditempati langsung. Selama ini, rumah hanya disewakan, dan biasanya penyewa melakukan pelaporan kepada lingkungan setempat.

Namun, hal itu tak terjadi dengan penyewa terakhir, yang belakangan diketahui adalah 11 WNA diduga pelaku penipuan lintas negara.

“Ya betul, dan tidak terlihat ada kegiatan dari luar. Kita melihat itu jadi tidak ada kegiatan apa-apa karena ditutup semua kan,” ucap Sapto.

Ia menambahkan, sebelumnya pemilik rumah sempat melakukan pelaporan, tetapi sejak penyewa terakhir ini menempati rumah, tidak ada lagi komunikasi atau laporan yang diterima pihak RT.

“Pemilik rumahnya sampai hari ini sedang dicoba ditelusuri siapa orangnya. Ada, sudah ada orangnya tapi belum bisa dikontak,” jelas Sapto.

Tidak ada papan nama atau penanda mencolok di pagar, hanya terlihat sedikit tanaman hias di halaman depan rumah. Namun yang membuat rumah ini mencurigakan justru berada di lantai dua.

Para pelaku menjalankan aksinya dari lantai dua rumah tersebut. Di sana terdapat bilik-bilik kedap suara yang dibuat dari tripleks dan busa. Selain itu, seluruh pintu dan jendela di lantai dua dilapisi peredam untuk mencegah suara bocor keluar. (wid,rks,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Destinasi Wisata Bersejarah dan Eksotis di India

India, sebuah peradaban tertua dengan warisan budaya yang kaya, menawarkan berbagai destinasi wisata eksotis yang sarat nilai sejarah. Situs web Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu.go.id) mengutip bahwa negara ini memiliki beragam bangunan menarik, beberapa di antaranya telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia.

Destinasi wisata di India terkenal dengan nilai sejarah, arsitektur kuno, serta legenda yang kental. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, India juga memiliki banyak tempat suci keagamaan. Selain itu, masakan khas India terkenal akan kelezatannya. Berikut adalah beberapa rekomendasi tempat wisata di India yang unik dan menarik.

Taj Mahal

Taj Mahal merupakan salah satu objek wisata paling ikonis di India, memiliki sejarah yang kaya, dan menjadi contoh arsitektur Mughal terindah di dunia. Dinamai berdasarkan nama istri kesayangan Kaisar Shah Jahan, Mumtaz Mahal.

Bangunan ini didirikan antara tahun 1632 dan 1648 oleh Kaisar Shah Jahan dari Kekaisaran Mughal sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada istrinya, Mumtaz Mahal, yang wafat saat melahirkan anak keempatnya. Makam ini didirikan sebagai monumen abadi untuk mengabadikan cintanya.

Taj Mahal adalah contoh utama arsitektur Mughal yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi arsitektur, seperti Persia, India, dan Islam. Bangunan ini terbuat dari marmer putih dan dikelilingi oleh taman yang indah. Kubah besar di atas bangunan merupakan salah satu fitur paling ikonis dan integral dari desainnya. Sejak tahun 1983, Taj Mahal telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO dan terus menjadi daya tarik wisata utama di India.

Golden City (Jaisalmer)

Golden City Jaisalmer memiliki keunikan pada sebagian besar bangunannya yang didirikan menggunakan pasir kuning, menjadikannya oase arsitektur tua di bukit pasir Gurun Thar. Jaisalmer dikenal dengan julukan "The Golden City" karena bangunan-bangunan di kota ini, terutama bentengnya, dibangun dengan batu pasir berwarna keemasan, memberikan tampilan keemasan yang indah saat terpapar sinar matahari.

Selain rumah-rumah indah, pengunjung juga dapat menjelajahi benteng megah. Salah satu daya tarik utama Jaisalmer adalah Kastil Emas atau Jaisalmer Fort, salah satu benteng kota yang masih berfungsi di dunia dan merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO.

Taman Nasional Periyar dan Suaka Margasatwa

Selain wisata budaya dan arsitektur, India juga menawarkan lanskap alam yang memukau. Salah satu yang paling terkenal di India Selatan adalah Taman Nasional Periyar dan Suaka Margasatwa. Taman nasional ini berpusat pada sebuah danau yang dibangun oleh seorang insinyur Inggris pada tahun 1895 untuk irigasi dan pasokan air ke kota Madurai.

Taman Nasional Periyar adalah rumah bagi berbagai jenis satwa liar, termasuk gajah, harimau Bengal, rusa sambar, gaur, macan dahan, beruang, dan banyak jenis burung. Salah satu daya tarik utama taman ini adalah kesempatan untuk melihat gajah di habitat alaminya. Pengunjung berkesempatan untuk mengamati satwa liar ini dalam perjalanan safari yang diselenggarakan di taman.

Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan perjalanan perahu di sekitar Danau Periyar untuk mengamati burung air, hewan liar, dan

pemandangan alam yang spektakuler.

The Holy City of Varanasi

Kunjungan ke India tidak lengkap tanpa berkunjung ke kota suci Varanasi, pusat ziarah utama umat Hindu. Kota suci ini terletak tepat di tepian Sungai Gangga, yang menjadi salah satu simbol keagamaan paling penting di sana. Varanasi juga termasuk salah satu kota tertua yang masih dihuni di dunia.

Menurut kepercayaan Hindu, mandi di Sungai Gangga di Varanasi dianggap dapat membersihkan dosa dan memberikan pembebasan (moksa) dari siklus kelahiran dan kematian (samsara).

The Gateway of India

The Gateway of India adalah salah satu tengeran paling terkenal di Mumbai, Maharashtra, India. Monumen ini dibangun pada awal abad ke-20 untuk memperingati kunjungan Raja George V dan Ratu Mary ke India pada tahun 1911. Namun, pembangunan baru selesai pada tahun 1924, beberapa tahun setelah kunjungan tersebut. Monumen ini juga menjadi tempat kedatangan Maharaja mahkota Inggris saat mereka tiba di India.

Monumen ini terbuat dari batu basal kuning dan menghadap ke laut. Strukturnya megah, dengan pilar-pilar kokoh, kubah besar, dan patung-patung yang menghiasi fasadnya. The Gateway of India adalah tempat populer bagi wisatawan yang ingin mengambil foto, bersantai di sekitar area ini, atau menikmati pemandangan Teluk Mumbai.

Mumbai

Sebagai salah satu kota terbesar dan terpopuler di India, Mumbai menawarkan beragam atraksi yang memadukan sejarah dan keindahan alam. Kota kosmopolitan ini menyuguhkan berbagai pilihan destinasi wisata. Bagi penggemar monumen bersejarah, terdapat Gateway

of India dan Kuil Shree Siddhivinayak yang menonjol dengan arsitektur unik dan megah.

Untuk wisata alam, Taman Nasional Sanjay Gandhi menjadi pilihan ideal. Di sini, pengunjung dapat menikmati suasana rindang pepohonan, mengamati beragam fauna, serta menjelajahi Gua Kanheri yang menyimpan berbagai relik, pahatan, dan lukisan Buddha. (nei,ist/dya)



Taj Mahal



Taman Nasional Periyar



Mumbai

Dapat Abolisi Dari (dari Hal 1) ...

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan seluruh fraksi di DPR telah menyepakati usulan abolisi yang diajukan Presiden untuk Tom Lembong tersebut dan tinggal menunggu penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

Selain mengajukan permintaan abolisi untuk terdakwa Kasus Impor Gula Tom Lembong, Presiden Prabowo Subianto juga mengajukan amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristiyanto.

"Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam dilansir cnnindonesia.

"Yang Kedua adalah pemberian persetujuan atas, dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor 42/pres/072025 tanggal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," imbuhnya.

Dasco menjelaskan bahwa dari hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong.

"Yang Kedua adalah pemberian persetujuan atas, dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor 42/pres/072025 tanggal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," imbuhnya.

Selain konstitusi, abolisi juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersyukur atas DPR sudah menyepakati dan menyetujui usulan pemerintah ini. "Kita bersyukur malam ini pertimbangan dari DPR sudah disepakati fraksi-fraksi. Kita tunggu selanjutnya keppres yang akan terbit," kata Supratman.

Menurutnya dengan pemberian abolisi ini maka proses hukum akan dihentikan. "Konsekuensinya kalau yang namanya abolisi maka semua proses hukum yang sedang berjalan dihentikan," kata Supratman di

Gedung DPR.

Supratman mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menandatangani usul pemberian abolisi Tom dan amnesti kepada Hasto itu telah diserahkan dan disetujui DPR melalui rapat konsultasi DPR dan pemerintah, Kamis (31/7/2025).

"Salah satu pertimbangan pada dua orang ini salah satunya kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka perayaan 17 Agustus," kata Supratman di kompleks parlemen.

Abolisi merupakan penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan pidana.

Abolisi diberikan oleh Presiden dan membuat proses hukum dihentikan kepada terdakwa kasus pidana, seolah-olah tidak pernah terjadi alias namanya dibersihkan.

Sementara, amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atas tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik. Amnesti bisa diberikan sebelum atau sesudah ada putusan pengadilan, dan berlaku secara umum atau kolektif.

Sifat politik yang dimaksud umumnya menyangkut kekuasaan, negara, atau pemerintah. Misalnya kasus makar, pemberontakan, atau gerakan separatisme yang didasari ideologi politik tertentu.

"Yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya dihentikan," kata Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

"Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan Presiden ya, dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit," ujarnya melanjutkan.

Supratman mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan abolisi atas kasus Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto. Selain Hasto, dia menyebutkan total ada 1.168 narapidana yang juga mendapat amnesti.

Diketahui bahwa Tom Lembong sudah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dijatuhi hukuman pidana 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Tom Lembong terbukti

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum, yakni Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hanya saja, dalam putusannya, majelis hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti karena Tom Lembong dinilai menikmati hasil tindak pidana korupsi dari kebijakan importasi gula di Kemendag tahun 2015-2016.

"Presiden saat pertama kali minta [saya] jadi Menkum, beliau menyampaikan bahwa khususnya ada kasus-kasus yang terkait, karena ada beberapa nanti yang akan diberi amnesti," kata Supratman.

"Salah satunya adalah kasus-kasus penghinaan presiden," imbuhnya.

Pemberian amnesti, lanjut Supratman, juga diberikan kepada enam pelaku makar yang tanpa senjata di Papua. Selain itu, ada pula narapidana yang berusia lanjut hingga yang memiliki gangguan kejiwaan sehingga harus menjalani perawatan diluar.

Usai disetujui DPR, Presiden Prabowo Subianto selanjutnya akan mengeluarkan Kepres yang akan mengesahkan keputusan abolisi dan amnesti tersebut.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan Menteri Perdagangan Era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, harus dibebaskan jika mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. "Harus dibebaskan," kata Abdul Fickar kepada Kompas.com, Kamis (31/7/2025).

Menurut Fickar, Tom Lembong harus dibebaskan karena abolisi berarti menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Dia menjelaskan bahwa abolisi adalah kewenangan mutlak dan konstitusional dari Presiden karena melihat kasus hukum yang sedang berjalan berlatar belakang politis.

Kemudian, Fickar menyebut abolisi boleh diberikan meski status hukumnya belum inkraht atau berkekuatan hukum tetap. "Boleh (diberikan sebelum inkraht), itu kewenangan kepala negara, mutlak dan konstitusional. Artinya, Presiden melihat kasusnya berlatar belakang politis," ujarnya dilansir Kompas.

Ficar juga meminta agar hal tersebut menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan kriminalisasi dalam penegakan hukum. "Seharusnya ini jadi peringatan juga buat penegak hukum, agar tidak ada kriminalisasi terhadap kebijakan," kata Ficar.

"Kejaksaan harus menyadari ini

jangan mau jadi alat politik rezim," jelas dia.

Ficar pun meminta Presiden untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejaksaan. Menurut dia, pemberian abolisi oleh Presiden menunjukkan kasus tersebut kental politisasi. "Konsekuensinya presiden juga harus mengevaluasi kerja-kerja pimpinan Kejaksaan," terangnya.

Kuasa Hukum Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada kliennya.

Sebagai catatan, abolisi berarti hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Atas informasi tersebut Ari terkejut dan mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Bahkan dia menanyakan asal muasal informasi tersebut dan baru mengetahui bahwa pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

"Saya mesti rapat dulu tuh memberikan informasi tanggapannya, saya belum tahu malah," kata Ari kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

Jika kabar tersebut benar, lanjut Ari, pihaknya menyampaikan terima kasih atas atensi dari pemerintah dan DPR RI. Ari juga menyatakan apresiasi atas langkah pemerintah dan DPR yang memberikan abolisi atau keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan. "Kami harus apresiasi sikap kepala negara yang punya kepedulian terhadap penegakan hukum di negara ini," ujar Ari.

Ari mengatakan, setelah adanya persetujuan abolisi dari DPR, maka kliennya tinggal menunggu diterbitkannya keputusan presiden. Ia menilai diberikannya abolisi ini merupakan bentuk kehadiran negara. "Memang kasus ini dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa ada permasalahan dalam proses hukumnya Pak Tom Lembong ini," ujar Ari.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai serius memperhatikan kasus hukum yang dijeratkan kepada kliennya. Dasco, yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, yang mengumumkan pemberian abolisi untuk Tom Lembong tersebut bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Kamis malam, pukul 21.00. Disebutkan, pemberian abolisi merupakan kelanjutan dari surat permohonan yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR kemudian disetujui. (han,ist/lut)

Kasus Korupsi Pengadaan LNG, KPK Tahan 2 Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan petinggi PT Pertamina, yakni Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) pada 27 November 2014-2018, dan Hari Karyuliarto (HR) selaku eks Direktur Gas PT Pertamina (Persero). Mereka adalah tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

(migas) di dalam negeri. Mengingat, Indonesia juga sedang mengembangkan daerah atau wilayah yang memiliki potensi gas.

Asep lantas mencontohkan adanya blok Masela dan blok Andaman yang diharapkan bisa menghasilkan devisa dan penerimaan bagi negara. "Ini lakukan impor tentu saja supply dan demand-nya akan terganggu gitu ya. Makin banyak suplay-nya ini akan menekan harga dari LNG yang diproduksi dalam negeri," ujar Asep dilansir Kompas

KPK menduga kedua tersangka memberikan persetujuan impor LNG tanpa adanya pendoman pengadaan, tidak didukung dasar sertifikasi dan analisa secara teknis serta ekonomis.

Asep mengatakan kedua tersangka diduga dengan sengaja melakukan pembelian impor tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan komisaris PT Pertamina. Atas perbuatan keduanya, negara diduga menanggung kerugian hingga 113.839.186 atau 113,8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Lebih lanjut dia mengatakan kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus ini, Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen



Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu (kanan) bersama kedua korupsi dalam pengadaan LNG, yakni Yenni Andayani (kiri), dan Hari Karyuliarto (kedua kanan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (31/7/2025). (ANTARA)

Agustiawan diketahui telah divonis sembilan tahun penjara.

Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Majelis Hakim menilai perbuatan Karen melanggar Pasal 2 ayat 1

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," ujar Hakim dalam Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada 24 Juni 2024.

Karen kemudian divonis selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024. Mahkamah Agung pada tanggal 28 Februari 2025 lantas memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan

surat perintah penyidikan kasus dugaan suap pengadaan gas alam cair (LNG) tersebut pada 6 Juni 2022. Pada 19 September 2023, KPK menetapkan Dirut Pertamina periode 2011-2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.

Karen kemudian divonis selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024.

Mahkamah Agung pada tanggal 28 Februari 2025 lantas memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara.

Sementara, untuk penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan LNG tersebut, KPK pada Selasa (29/7/2025), memanggil VP Litigasi Pertamina Jarrod Dwi Prastowo, Sekretaris Dekom Pertamina Priska Sufhana, Managing Director PPT Energy Trading Singapore Pte Ltd (PPT ETS) tahun 2016-2021 Arief Basuki, dan seorang pihak swasta berinisial RT sebagai saksi.

Kemudian, pada Rabu (30/7/2025), penyidik KPK memanggil Manajer Operasi pada PPT ETS tahun 2016-2021 Bayu Satria Irawan dan seorang pihak swasta berinisial RAW sebagai saksi kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan suap pengadaan gas alam cair (LNG) tersebut pada 6 Juni 2022.

Pada 19 September 2023, KPK menetapkan Dirut Pertamina periode 2011-2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat. (ant,ist/lut)

"Tersangka HK dan YA hari ini dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025,"

ASEP GUNTUR RAHAYU
Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK

"Tersangka HK dan YA hari ini dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025," ujar Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Asep mengatakan tersangka HK ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, sedangkan YA ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Asep mengungkapkan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan persetujuan pengadaan LNG impor tanpa adanya rekomendasi atau izin dari Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM).

Dia mengatakan, kedua tersangka diduga pembelian LNG ini tanpa adanya rekomendasi atau izin dari Kementerian ESDM. Sedangkan, Kebijakan impor gas atau LNG harus ada penetapan akan kebutuhan impor dari Menteri ESDM.

Rekomendasi dari Menteri ESDM itu penting sebelum impor LNG dilakukan guna memastikan peruntukannya di dalam negeri. Selain itu juga penting untuk menjaga iklim bisnis minyak dan gas